

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berada pada kawasan Asia Timur yang dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kekerasan seksual tinggi yang di sebabkan oleh budaya patriarki dan misogini yang makin meluas dengan berjalannya perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya isu kekerasan berbasis gender digital. Di Korea Selatan, patriarki masih menjadi salah satu bagian dari masyarakat dalam aspek sosial dan budaya di Korea Selatan, begitupun isu kesetaraan gender di Korea Selatan yang masih kurang akan perhatian masyarakat dan masih terbatas memberikan hak-hak yang layak bagi Wanita, hal ini di karenakan di Korea Selatan memiliki Gerakan yang masih berkembang pesat yaitu Gerakan anti-feminisme. Sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan, Park Geun-hye diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan pengaruh lebih besar pada kebijakan pro-gender. Ia menjabat dari tahun 2013 hingga 2016. Anggaran untuk program yang mendorong kesetaraan gender, seperti penitipan anak, cuti melahirkan, dan subsidi penitipan anak, telah meningkat selama masa jabatannya.

Meskipun demikian, masih sangat sedikit perempuan yang menduduki jabatan penting di pemerintahan. Karena Park melanggar janji kampanyenya untuk menunjuk perempuan pada jabatan-jabatan penting di pemerintahan, masyarakat mulai memandangnya sebagai "presiden perempuan tanpa perempuan". Hal tersebut terjadi karena gagal nya park untuk melakukan pro gender atau kesetaraan gender selama pemerintahannya. Saat itulah Moon Jae In sebagai calon presiden selanjutnya

memanfaatkan situasi park geun hye untuk membuktikan atau menjalankan kebijakan terkait kesetaraan gender tersebut. Pembagian kerja berdasarkan gender juga masih cukup mencolok di masyarakat Korea, contohnya para laki-laki di Korea Selatan yang diperkirakan lebih banyak aktif secara ekonomi dibandingkan perempuan yang kurang terlalu aktif secara ekonomi maupun masuk dalam dunia kerja, hal tersebut dikarenakan tuntutan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak (Chang and England 2011).

Dengan kata lain dalam pekerjaan separuh perempuan tidak dimasukkan ke dalam dunia pekerjaan atas dasar pembagian gender yang dipolakan sedemikian rupa. Ketidaksetaraan gender terwujud dalam bentuk perbedaan upah dan ketidakadilan dalam status pekerjaan. Perbedaan upah berdasarkan gender sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa perempuan terkonsentrasi di perusahaan-perusahaan kecil dengan gaji rendah, atau mereka bekerja pada pekerjaan yang tidak stabil dan bersifat sementara. (OECD, 2022)

Di Korea Selatan munculnya istilah “Kejahatan Seksual Digital” datang pada tahun 2015. Prevalensi kekerasan seksual digital di Korea Selatan meningkat dan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan semua perempuan dan anak perempuan. Di Korea Selatan, prevalensi dan teror kejahatan seks digital telah meningkat sehingga banyak korban berpikir untuk mengakhiri hidup mereka atau meninggalkan negara Korea Selatan. Kejahatan seksual berbasis Digital secara informal didefinisikan sebagai kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara *OnLine* dan *OffLine* melalui perangkat digital dan juga didefinisikan sebagai sebuah konsep yang benar-benar melanggar hak moral orang lain di dunia maya yang di

lakukan melalui pembuatan film, penyebaran film, mengancam. Menurut *Human Rights Watch* (HRW), Korea Selatan mengalami peningkatan prevalensi dan ketakutan terhadap kejahatan seks digital sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan semua perempuan dan anak perempuan. Menurut analisis kejahatan pada tahun 2016 oleh polisi korea, peningkatan paling cepat dalam kejahatan kekerasan seksual dalam satu dekade terakhir adalah “kejahatan berbasis kamera”, yang meningkat dari 3,6% pada tahun 2006 menjadi 24,9% pada tahun 2015 (KIM & CHUNG, 2018).

Adapun insiden lain yang menyangkut perihal kekerasan seksual digital yaitu situs web pornografi terbesar di Korea Selatan yang disebut “Soronet”. Dalam situs web tersebut berisi kumpulan video pornografi mulai dari pelecehan anak-anak, kamera tersembunyi (*spycam*) di toilet umum, rumah, hotel, kebanyakan korban tersebut adalah perempuan dan situs web tersebut memiliki 1 juta anggota, sebelum pemerintah memaksanya untuk ditutup pada tahun 2016. Penutupan “Soronet” mengangkat isu kekerasan seksual berbasis digital dalam masyarakat Korea selatan (KIM CHOI, 2023).

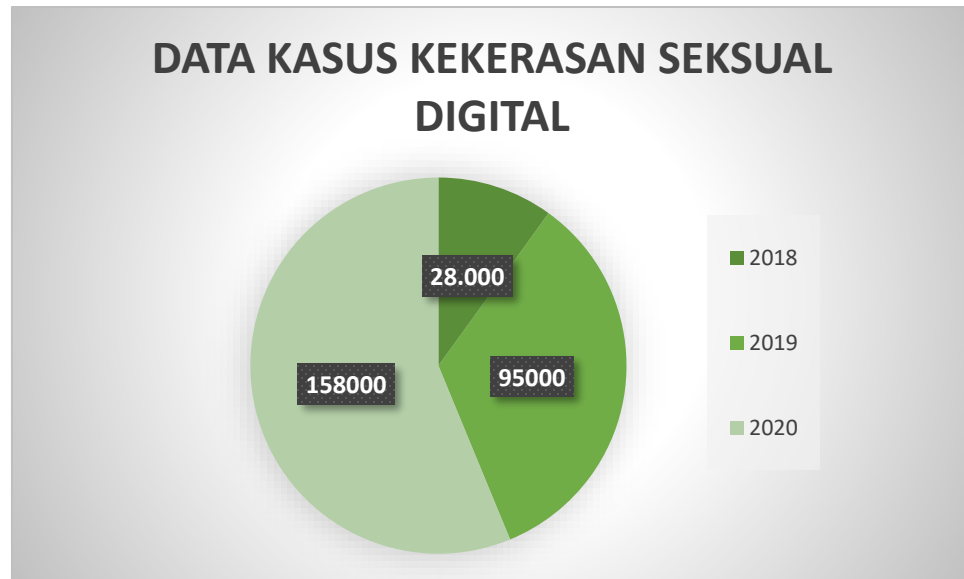
Pada tahun 2018 hingga 2020 perempuan dan anak perempuan di Korea Selatan tidak bisa lepas dari adanya seksisme, misogini, atau kekerasan berbasis gender di ruang digital sebagai manifestasi baru dari kekerasan berbasis gender pada era modern. Ada beberapa faktor yang menjadikan kekerasan seksual difasilitasi oleh teknologi digital, khususnya ialah melalui hadirnya teknologi yang memungkinkan pelaku pelecehan seksual melancarkan aksinya secara Anonym, sehingga para pelaku dapat terus-menerus melakukan kejahatan seksual berbasis digital secara mudah

khususnya dalam menyalin maupun menyebarluaskan konten pada khalayak umum. Melalui peluang yang diterima oleh para pelaku penyebaran seksual pula, kian menyebabkan rantai penggunaan platform digital untuk melakukan tindak kekerasan seksual secara terus menerus.

Misogini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dapat merujuk pada perilaku yang tidak sopan terhadap perempuan, dimana hal ini dapat secara terang-terangan dilakukan dalam menjalankan aksi pelecehan seksual. Dalam hal ini pula, misogini dapat diidentifikasi sebagai tindak penghinaan maupun kebencian terhadap kaum perempuan, yang dapat muncul dalam berbagai cara layaknya segregasi seksual, penyerangan terhadap perempuan, kekejaman terhadap perempuan, dan tipifikasi pada seksual terhadap seksual terhadap seksual. Di Korea Selatan terdapat suatu istilah "*Kimchi-Nyeo*" atau dalam Bahasa Indonesia ialah "Gadis Kimchi" (Ahn et al. 2016).

Istilah ini merupakan Bahasa gaul yang tunjukkan kepada seorang gadis muda yang tidak hemat dan terpicat dengan fashion kelas atas, istilah ini juga di berikan terhadap seorang wanita yang berharap mendapatkan pasangan yang dapat membiayai saat berkencan dan saat mempersiapkan pernikahan mereka. Selain itu, istilah ini juga dipakai para kaum misoginis dan seksis untuk melabelkan feminis Korea Selatan sebagai "Gadis Kimchi" tersebut. Hal ini menyebabkan perempuan Korea Selatan menjadi dasar seksisme di Korea Selatan, dimana kepercayaan kaum misogini merupakan perempuan Korea Selatan yang mempermalukan bangsa, sedangkan para lelaki Korea Selatan bertanggung jawab untuk melestarikan warisan bangsa. Dengan kata lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa nasionalisme yang

dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Korea Selatan merupakan ideologi yang mendasari misogini di Korea Selatan.



**Gambar 1. 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Digital Di Korea Selatan**

**Sumber : (KOREA HERALD,2023)**

Terdapat beberapa jenis kasus kekerasan seksual *digital* di Korea Selatan, yang diantaranya ialah *Spycam* yang diidentifikasi sebagai pemanfaatan kamera rahasia guna dapat merekam adanya tindakan seksual orang lain tanpa sepengetahuan korban, *Chat Harassment* yang diidentifikasi sebagai kekerasan seksual berbasis pemanfaatan media sosial maupun aplikasi pesan instan guna dapat melakukan pelecehan seksual, *Pornography* yang dimana merupakan penyebaran konten seksual digital, dan *Cyberbullying* sebagai wujud intimidasi maupun pelecehan yang dilakukan secara *online*. Praktik-praktik tersebut penggunaan *Spycam* dilakukan melalui adanya penggunaan yang meluas dalam ruang publik dan pribadi, sehingga memunculkan kekhawatiran akan privasi dan keamanan individu, serta menciptakan lingkungan yang mengancam kebebasan dan martabat manusia. Kementrian

Kehakiman Korea Selatan mengemukakan adanya data dari tindak kasus kekerasan seksual digital di Korea Selatan sejak tahun 2018 hingga sampai kepada tahun 2020. Dimana rata-rata dari adanya kasus kekerasan seksual meningkat sebanyak 28.000 kasus di tahun 2018, sehingga pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual digital di Korea Selatan meningkat menjadi 95.000 kasus. Sehingga melalui adanya kenaikan kasus tersebut pada tahun 2020, meningkat menjadi 158.000 kasus. Data diatas kian menggambarkan pertambahan jumlah korban kekerasan seksual digital yang mengalami trauma maupun dampak dari kekerasan seksual dimana bagi korban dampak serangan *cybersexual* bisa sangat merugikan dan menghancurkan. (KOREA HERALD, 2023)

Pelecehan seksual digital dapat menyebabkan terjadinya dampak serius pada individu yang menjadi korban, dimana salah satu dampak yang paling umum ialah trauma psikologis yang mendalam dapat menghasilkan stress, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya. Selain itu pula, korban juga mungkin mengalami gangguan emosi yang berkepanjangan, layaknya kesepian, penyesalan, maupun rasa malu yang terus menerus menghantui kesehatan mental mereka. Perlakuan yang tidak diinginkan melalui adanya pelanggaran privasi dalam bentuk pelecehan seksual digital juga kian dapat mengancam keseimbangan psikologis dan sosial korban kian menyebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap orang lain dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Tentunya, dampak negatif tersebut juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan seksual korban, terutama jika mereka menjadi sasaran kekerasan fisik ataupun pemaksaan. Selain itu, gangguan pada kehidupan sehari-hari korban juga merupakan konsekuensi yang sering terjadi,

dengan rutinitas harian yang terganggu oleh beban psikologis yang dialami. Dalam jangka panjang, trauma yang dihasilkan oleh pelecehan seksual digital dapat terus berdampak, mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup korban dalam jangka waktu yang panjang.

Untuk mencegah situasi seperti ini, pentingnya peningkatan kesadaran dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual digital, sehingga dipercaya dapat mendorong perlindungan privasi serta keamanan *online*. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban serangan *cybersexual*, para pelaku meminta pertanggung jawaban negara yang memerlukan penguatan Undang-Undang yang dapat menaungi permasalahan *Cybersexual* dengan baik. Di Korea Selatan itu sendiri, dalam mengejawantahkan adanya peraturan perundang-perundangan, UN Women berkontribusi lebih lanjut guna dapat memperkuat ataupun mencari solusi guna dapat meringankan kekerasan seksual digital tersebut.

Strategi UN Women yang lebih besar untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mencakup penanganan kekerasan seksual berbasis digital. Untuk mencegah dan merespons kekerasan digital, undang-undang dan kebijakan harus dikembangkan dan dimodifikasi. Selain itu, kesenjangan data dan penelitian harus diisi, layanan-layanan penting harus dimodifikasi untuk mendukung para penyintas, dan upaya harus dilakukan untuk mengubah norma-norma sosial dan melibatkan laki-laki dan anak laki-laki untuk mencegah kekerasan berbasis gender sebelum kekerasan tersebut terjadi. Melalui Kesetaraan Generasi, UN Women juga mengatasi masalah ini dengan meningkatkan layanan bagi para penyintas,

memperkuat program pencegahan, mendukung kelompok feminis, dan melakukan lebih banyak lagi.

Pusat Unggulan Perempuan untuk Kesetaraan Gender PBB atau dapat dikenali sebagai "Pusat" bertujuan untuk mengatasi diskriminasi sosial, norma dan praktik yang melanggengkan ketidaksetaraan gender di Asia dan Pasifik, dan untuk meningkatkan implementasi kerangka normatif dan kebijakan. Korea selatan mendirikan kantor UN Women di Seoul pada tahun 2022 dengan dukungan dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea. Pusat ini berfungsi sebagai "pusat pengetahuan" untuk mendukung pengembangan kemitraan multi-pemangku kepentingan, jaringan, penelitian, pengajaran, dan pelatihan. (UN WOMEN, 2022a)

Di kawasan Asia-Pasifik, Pusat Keunggulan Kesetaraan Gender PBB untuk Perempuan adalah yang pertama. Pusat ini berfungsi sebagai "pusat pengetahuan" untuk mendukung pengembangan kemitraan multi-pemangku kepentingan, jaringan, penelitian, pengajaran, dan pelatihan. Di kawasan Asia-Pasifik, Pusat Keunggulan Kesetaraan Gender PBB untuk Perempuan adalah yang pertama. Melalui pemanfaatan kemampuan operasional dan teknis UN Women serta jaringan dan platform yang ada saat ini, Pusat atau UN Women mampu menawarkan program pelatihan khusus kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga akademis, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam hal ini, UN Women berusaha mengupayakan studi dan menyebarkan statistik gender untuk dapat mendorong kolaborasi multipihak di tingkat nasional dan regional.(UN WOMEN, 2022b)



UN Women ini berupaya mengoperasionalkan kerangka normatif mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui tiga pilar kerja, semuanya di bawah arahan Direktur Pusat. Selain itu, UN Women ini berupaya memberikan masukan mengenai pendekatan kreatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan secara cepat dan dramatis mengubah norma-norma sosial yang merugikan. lingkungan sosial yang berbeda di kawasan Asia-Pasifik, dan menjalin kolaborasi lintas sektor. Melalui jaringan regional dan internasional UN Women, pusat ini juga akan memanfaatkan keahlian Republik Korea yang luas dalam memajukan kesetaraan gender dan menyebarkan kisah motivasi dan pembelajaran Korea ke negara-negara lain. (UN WOMEN, 2022b)

Kekerasan seksual digital ini merupakan masalah yang cukup serius karena kekerasan ini dapat menimbulkan permasalahan lain yang dapat membahayakan dan menghasilkan trauma yang cukup mendalam terhadap korban dalam jangka waktu yang Panjang dan meningkatkan kasus kekerasan seksual. Karena penggunaan media sosial dan internet semakin umum, kekerasan *OnLine* berbasis gender perlu dikaji lebih mendalam. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa kejahatan berbasis orientasi web paling sering dilacak dalam domain individu, seperti bahaya, siksaan, pengikut, dan dorongan nyata. Selain itu, pandemi virus Corona juga telah menambah peningkatan kebrutalan berbasis orientasi berbasis web. Kondisi ini memerlukan pertimbangan khusus dan kajian lebih lanjut untuk memahami, mencegah, dan menangani permasalahan tersebut. Selain itu, ketiadaan referensi dan informasi mengenai inovasi serta kemudahan pengakuan juga menjadi pemicu terjadinya kebrutalan berbasis orientasi online.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, Adapun fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yakni :

**“Bagaimana implementasi program UN Women dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital di Korea Selatan?”**

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan untuk mencegah adanya kekeliruan maupun peluasan pokok masalah agar penelitian dapat lebih tertata dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kekerasan seksual digital yang ada di korea selatan, lalu membahas bagaimana upaya UN Women terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual digital dan pembahasan kekerasan seksual berbasis digital ini dibatasi pada periode tahun 2018-2023 di karenakan pada tahun tersebut memiliki laporan yang cukup banyak terkait kasus kekerasan seksual digital yang telah di tetapkan kedalam skandal terbesar di korea selatan.

## **1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya UN Women dalam menangani perilaku kekerasan seksual dapat terimplementasikan di Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui beserta dengan mengidentifikasi bagaimana berjalannya dampak dari kekerasan seksual digital tersebut terhadap masyarakat Korea Selatan.

3. Untuk mengetahui apakah program UN Women berhasil di implementasikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital di korea selatan.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam Hubungan Internasional, lebih tepat nya berfokus pada kasus kekerasan seksual digital di Korea Selatan.
2. Secara Praktis, di harapkan penelitian mengenai kekerasan seksual digital dan upaya UN women ini dapat di kembangkan dan di teruskan lebih luas lagi agar dapat di ketahui oleh banyak orang.
3. Secara Akademis, penelitian ini di harapkan berguna sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan penulis dan juga syarat menempuh Tugas Akhir pada prodi Hubungan Internasional Universitas di Pasundan Bandung.